

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Banjir merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang kerap melanda daerah perkotaan, terutama di wilayah yang memiliki sistem drainase yang buruk dan tata kelola air yang kurang optimal. Menurut Sutopo<sup>1</sup>, banjir dapat terjadi akibat faktor alam seperti curah hujan tinggi dan pasang surut air laut, serta faktor antropogenik seperti perubahan tata guna lahan dan penyempitan daerah aliran sungai.<sup>1</sup> Dampak dari banjir tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat merusak infrastruktur, menyebabkan kerugian ekonomi, serta meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Sejalan dengan itu, sebuah studi menyebutkan bahwa “*urban floods are increasingly recognized as one of the most severe risks for cities in developing countries, causing not only physical damage but also long-term socio-economic disruptions*”.<sup>2</sup> Hal ini menegaskan bahwa permasalahan banjir di perkotaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berimplikasi pada kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak melakukan kerusakan di bumi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT:

ظَاهِرُ الْفَسَادِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذْبِقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

---

<sup>1</sup> Sutopo Purwo Nugroho, “Manajemen Bencana di Indonesia,” *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, t.t., Graha BNPB - Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 1312.

<sup>2</sup> Gupta R dan Nair A, “Urban flood resilience in developing countries: Challenges and opportunities,” *International Journal of Disaster Risk Reduction* 62 (2021).

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41)<sup>3</sup>

Ayat ini memberikan peringatan bahwa bencana, termasuk banjir, dapat terjadi akibat kelalaian manusia dalam mengelola lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur, terutama di daerah perkotaan yang rentan terhadap banjir. Dalam konteks global, penelitian terbaru menegaskan bahwa “*effective flood risk governance requires the integration of structural and non-structural measures, including land-use planning, community participation, and institutional coordination*”.<sup>4</sup>

Kota Banjarmasin, yang dikenal sebagai *Kota Seribu Sungai*, memiliki kondisi geografis yang unik dan sangat rentan terhadap banjir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin, sekitar 70% wilayah kota berada di bawah satu meter dari permukaan laut, sehingga kawasan ini mudah tergenang air, terutama saat hujan deras atau pasang air laut.<sup>5</sup> Penyempitan sungai akibat sedimentasi, alih fungsi lahan, serta terbatasnya lahan resapan semakin memperburuk risiko banjir di kota ini. Kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa “*rapid urbanization and poor drainage design exacerbate*

<sup>3</sup> “Surat Ar-Rum Ayat 41 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 4 Maret 2025, <https://tafsirweb.com/7405-surat-ar-rum-ayat-41.html>.

<sup>4</sup> Jha R dan Singh, A., “Governing flood risk: Integrating land use planning and community participation in South Asian cities,” *Environmental Science & Policy* 135 (2022): 55–65.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, “Kota Banjarmasin Dalam Angka 2024,” diakses 4 Maret 2025, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/2bde8bcecd3b7208af2df53f/kota-banjarmasin-dalam-angka-2024.html>.

*pluvial flooding in low-lying cities*”,<sup>6</sup> yang menggambarkan realitas Banjarmasin saat ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin mencatat bahwa beberapa wilayah yang tergolong rawan banjir meliputi Kecamatan Banjarmasin Tengah yang sering mengalami genangan akibat sistem drainase yang kurang optimal, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang berada di dataran rendah dan terpengaruh pasang surut air laut, Kecamatan Banjarmasin Timur yang rawan akibat meluapnya aliran sungai saat curah hujan tinggi, Kecamatan Banjarmasin Barat yang terdampak sedimentasi sungai sehingga kapasitas tampungan air berkurang, serta Kecamatan Banjarmasin Utara yang minim lahan resapan sehingga mudah mengalami genangan.<sup>7</sup> Kategori banjir yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah banjir yang disebabkan oleh luapan air dari drainase atau aliran sungai dengan ketinggian mencapai 30 cm atau setinggi knalpot motor, yang tidak mengalami penurunan debit air selama lebih dari dua jam.

Hasil wawancara dengan Dinas PUPR Kota Banjarmasin<sup>8</sup> menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam penanganan banjir di kota ini adalah keterbatasan kapasitas drainase dalam menampung debit air hujan yang tinggi. Banyak sistem drainase yang masih menggunakan desain lama dan belum disesuaikan dengan perkembangan tata kota yang semakin padat. Selain itu,

---

<sup>6</sup> Rahman M dkk., “Pluvial flooding and poor drainage in low-lying cities: Evidence from Southeast Asia,” *Natural Hazards* 117, no. 1 (2023): 245–267.

<sup>7</sup> “BPBD Kota Banjarmasin,” BPBD Kota Banjarmasin, 3 Maret 2025, <https://bpbd.banjarmasinkota.go.id/>.

<sup>8</sup> Kepala Bidang Sumber Daya Air, “Upaya pengendalian banjir yang sudah dilakukan oleh Dinas PUPR kota banjarmasin,” 27 Desember 2023.

kurangnya pemeliharaan drainase serta perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke saluran air turut memperparah kondisi ini. Faktor lain yang menjadi kendala adalah minimnya anggaran untuk proyek perbaikan drainase dan normalisasi sungai, sehingga banyak infrastruktur yang tidak dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Sejalan dengan itu, penelitian lain menegaskan bahwa *“financial constraints and lack of technical capacity remain the key barriers for municipalities in implementing sustainable flood control measures”*.<sup>9</sup>

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin memiliki peran penting dalam pengelolaan infrastruktur dan tata ruang kota, termasuk dalam pengendalian banjir. Dua bagian utama di Dinas PUPR yang menangani banjir adalah Bagian Drainase dan Bagian Sungai. Bagian Drainase bertanggung jawab dalam perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan sistem drainase perkotaan, mengawasi sistem saluran air agar tetap berfungsi optimal, serta melakukan normalisasi dan pelebaran drainase yang mengalami penyumbatan atau sedimentasi. Sementara itu, Bagian Sungai bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengurangan sungai untuk mengurangi sedimentasi, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan aliran sungai, serta mengendalikan perizinan terkait pemanfaatan daerah aliran sungai agar tidak memperparah risiko banjir.

Pencegahan banjir di Kota Banjarmasin berlandaskan beberapa regulasi utama, seperti Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang mengatur tanggung jawab

---

<sup>9</sup> Lozano R dan Andersson T, “Barriers and enablers for urban flood risk management: Evidence from municipal practices,” *Sustainable Cities and Society* 55 (2020).

pemerintah daerah dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sistem drainase yang berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur pengelolaan sumber daya air termasuk sungai dan drainase sebagai bagian dari mitigasi bencana. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga menekankan pentingnya mitigasi bencana berbasis tata ruang dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan banjir. Temuan serupa juga dijelaskan oleh “*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, which emphasizes the importance of proactive disaster risk governance and local government accountability in flood risk management*”.<sup>10</sup>

Banjir di Kota Banjarmasin umumnya terjadi pada musim hujan, terutama antara November hingga Februari, ketika curah hujan tinggi bersamaan dengan fenomena pasang air laut. Sebagai upaya pengurangan risiko banjir, dinas PUPR Kota Banjarmasin telah menetapkan penanganan banjir sebagai salah satu program prioritasnya, yang mencakup normalisasi sungai dan pengeringan sedimentasi lumpur di berbagai drainase untuk mengurangi durasi genangan saat banjir melanda. Peran ini tidak sekadar tugas administratif, melainkan manifestasi dari kewajiban fundamental negara untuk melindungi warga negara dan menjamin kesejahteraan umum. Permasalahan banjir yang berulang dan dampaknya yang parah menggarisbawahi bahwa penanganan banjir bukan hanya sekadar tugas teknis, tetapi merupakan bagian integral dari tanggung jawab konstitusional negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan dasar kepada rakyatnya.

---

<sup>10</sup> United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030: Midterm review* (UNDRR, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Efektivitas Kinerja Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam Pencegahan Banjir di Kota Banjarmasin”** agar dapat secara langsung mencerminkan sejauh mana negara memenuhi amanat konstitusinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin dalam menangani banjir di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi PUPR Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugasnya menangani banjir di Kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis efektivitas kinerja Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam menangani banjir berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Perwali No. 58 Tahun 2022 (Bidang Sungai dan Bidang Drainase).
2. Untuk Mengidentifikasi kendala yang dihadapi Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait penanganan banjir, baik kendala internal, eksternal, maupun teknis.

## **D. Signifikansi Masalah**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dalam sumbangsih pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi kajian dalam bidang Hukum Tata Negara terkait peran dan kewenangan instansi pemerintah dalam penanganan masalah publik seperti banjir.
- b. Sebagai bahan kajian dan contoh bagi peneliti yang ingin mengkaji masalah tersebut dari sudut pandang yang berbeda.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syariah terkhusus jurusan Hukum Tatanegara dan mahasiswa serta masyarakat.
- b. Sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, sekaligus menambah wawasan penulis dalam memahami implementasi hukum tata negara di tingkat daerah.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan untuk memperjelas maksud judul penelitian, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

## 1. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Agus Dwiyanto, efektivitas dalam konteks organisasi sektor publik diartikan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuan kebijakan dan pelayanan publik sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan, terutama dilihat dari hasil dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.<sup>11</sup> Sejalan dengan itu, Sedarmayanti menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan ketepatan pencapaian tujuan, di mana suatu kegiatan dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai atau mendekati target yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>12</sup> Dengan demikian, dalam penelitian ini efektivitas dimaknai sebagai tingkat keberhasilan Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan pencegahan banjir secara optimal sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

## 2. Kinerja

Kinerja dalam manajemen sektor publik dipahami sebagai tingkat ketercapaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mesri Welhelmina Nisriani Manafe, kinerja sektor publik merupakan *degree of accomplishment*, yaitu sejauh mana output dan outcome yang direncanakan dapat direalisasikan secara

---

<sup>11</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik* (Gadjah Mada University Press, 2021), 49–50.

<sup>12</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Refika Aditama, 2021), 103.

optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tepat dalam lingkungan yang dinamis, serta bersifat multidimensi karena mencakup produktivitas, efisiensi, efektivitas, kualitas layanan, akuntabilitas, responsivitas, dan kepuasan pengguna layanan publik.<sup>13</sup> Sejalan dengan itu, Agus Dwiyanto menegaskan bahwa kinerja instansi pemerintah harus dinilai berdasarkan hasil dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sebagai penerima layanan publik.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, kinerja dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada bidang pencegahan banjir, yang diukur melalui perencanaan program, pemeliharaan sungai dan drainase, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, monitoring dan evaluasi, serta pelibatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022.

### 3. Dinas

Dinas dalam konteks pemerintahan daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan kewenangan daerah. Menurut Ryaas Rasyid, dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah yang memiliki fungsi teknis operasional dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan

---

<sup>13</sup> Mesri Welhelmina Nisriani Manafe, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi* (CV. Media Sains Indonesia, 2022), 22–27.

<sup>14</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik*, 49–50.

kebijakan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Sejalan dengan itu, Nurcholis menjelaskan bahwa dinas merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat teknis dan langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

<sup>16</sup> Dengan demikian, dalam penelitian ini dinas dimaknai sebagai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, yaitu perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur serta penataan ruang, termasuk dalam upaya pencegahan banjir.

#### 4. Pencegahan

Pencegahan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah atau situasi tertentu.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, pencegahan mengacu pada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin untuk mencegah, mengelola, dan meminimalkan dampak banjir, seperti normalisasi sungai, pembangunan drainase, serta mitigasi bencana.

#### 5. Banjir

Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi suatu wilayah akibat hujan deras, kerusakan sistem drainase, atau faktor lain seperti

---

<sup>15</sup> Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (RajaGrafindo Persada, 2021), 87–88.

<sup>16</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Grasindo, 2021), 112–13.

<sup>17</sup> “Kementerian Pekerjaan Umum,” Kementerian PUPR, diakses 28 Desember 2024, <https://pu.go.id/page/Tugas-dan-Fungsi>.

perubahan lingkungan dan tata ruang yang buruk.<sup>18</sup> Dalam konteks penelitian ini, banjir merujuk pada peristiwa yang terjadi di Kota Banjarmasin sebagai dampak dari kondisi geografis dan permasalahan tata kelola air, yang membutuhkan penanganan serius oleh Dinas PUPR.

#### 6. Peraturan Walikota

Peraturan Wali Kota (Perwali) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang ditetapkan oleh Walikota sebagai kepala daerah. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan Perwali adalah Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.<sup>19</sup>

### F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian ini untuk mempermudah memperoleh perbandingan, Gambaran, serta menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi penelitian. Penelitian-penelitian tersebut digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk memperjelas permasalahan yang diangkat, dengan mengambil topik yang relevan dengan “Efektifitas Kinerja Dinas Pupr Kota Banjarmasin Dalam Pencegahan Banjir Di Kota Banjarmasin” Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis

---

<sup>18</sup> Laksni Sedyowati, *Kota Bebas Banjir? Antara Harapan dan Kenyataan* (Selaras Media Kreasindo, 2021), [https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/3867/9/Kota%20Bebas%20Banjir\\_full.pdf](https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/3867/9/Kota%20Bebas%20Banjir_full.pdf).

<sup>19</sup> Tri Jata Ayu Pramesti S.H, “Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota | Klinik Hukumonline,” 10 April 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota-lt5514ad1af157a/>.

menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik. Meskipun terdapat kemiripan, penelitian - penelitian tersebut juga memiliki perbedaan tertentu. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang relevan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Theresia Putri dengan judul “Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus Dalam Pengelolaan Drainase Sebagai Strategi Pencegahan Banjir”.<sup>20</sup> Penelitian ini membahas kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase dengan menggunakan indikator kinerja sektor publik menurut Agus Dwiyanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPR tergolong cukup baik, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, pemeliharaan drainase yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan lokasi penelitian, di mana skripsi tersebut menelaah kinerja PUPR dalam pengelolaan drainase secara umum di Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas kinerja Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022.
2. Skripsi yang ditulis oleh Imanuel Jerry Korisano dengan judul “Optimalisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua

---

<sup>20</sup> Putri Theresia, “Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus Dalam Pengelolaan Drainase Sebagai Strategi Pencegahan Banjir” (Other, Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2025),

Selatan”.<sup>21</sup> Penelitian ini membahas kinerja Dinas PUPR Kabupaten Merauke dalam penanggulangan banjir dengan fokus pada pelaksanaan program drainase, normalisasi saluran air, serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PUPR tergolong cukup optimal, namun masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan kondisi geografis wilayah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus dan lokasi kajian, di mana skripsi tersebut menelaah optimalisasi kinerja PUPR dalam penanggulangan banjir secara umum di Kabupaten Merauke, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas kinerja Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Zidane Ramadan dengan judul “Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Mengatasi Banjir di Kota Pekanbaru”.<sup>22</sup> Penelitian ini membahas upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir, khususnya melalui pembangunan dan perbaikan drainase, normalisasi saluran air, serta koordinasi teknis dalam penanganan banjir perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas PUPR cukup membantu dalam mengurangi genangan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, pemeliharaan drainase yang belum optimal,

---

<sup>21</sup> Imanuel Jerry Korisano, “Optimalisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan” (diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025).

<sup>22</sup> Dimas Zidane Ramadan, “Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Mengatasi Banjir di Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

dan rendahnya kesadaran masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis, di mana skripsi tersebut menitikberatkan pada upaya penanganan banjir oleh PUPR, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas kinerja Dinas PUPR Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir berdasarkan indikator kinerja dan ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022.

4. Skripsi yang ditulis oleh D. Reski dengan judul “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mengatasi Bencana Banjir di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh”.<sup>23</sup> Tulisan ini membahas strategi BPBD dalam menangani banjir di Kecamatan Hamparan Rawang, dengan penekanan pada peran BPBD dalam mitigasi dan pencegahan bencana. Yang membedakan tulisan ini dengan skripsi yang disusun penulis adalah Efektivitas Kinerja PUPR Kota Banjarmasin sebagai aktor utama yang dikaji, dengan fokus khusus pada kendala yang dihadapi dalam menangani banjir dan upaya teknis serta kebijakan yang diambil untuk mengatasinya.
5. Jurnal yang ditulis oleh Novi Sonia dan Mustiqowati Ummul Fithriyyah dengan judul “Strategi Penanggulangan Banjir Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) di Kota Pekanbaru: Dalam Tinjauan

---

<sup>23</sup> Demi Reski, “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Baerah (BPBD) Dalam Mengatasi Bencana Banjir Di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi” (Riau Pekanbaru, Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

Analisis SWOT".<sup>24</sup> Tulisan ini membahas strategi penanggulangan banjir oleh PUPR di Kota Pekanbaru menggunakan analisis SWOT, dengan fokus pada identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang membedakan tulisan ini dengan skripsi yang disusun penulis adalah pendekatan yang digunakan. Penelitian ini lebih menekankan pada studi kasus dengan analisis mendalam terhadap Kinerja PUPR Kota Banjarmasin, termasuk kendala dan upaya dalam menyelesaikan permasalahan banjir, tanpa menggunakan analisis SWOT.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima (V) bab yang disusun secara sistematis karena masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri. Namun, pembahasan masing-masing bab akan memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar akan penulis rincikan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikasi penelitian. Definisi istilah dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun

---

<sup>24</sup> Novi Sonia dan Mustiqowati Ummul Fithriyyah, "Strategi Penanggulangan Banjir Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang(PUPR) Di Kota Pekanbaru: Dalam Tinjauan Analisis SWOT," *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis* Vol.5, no. No.2 (2023): 7.

kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu kajian teori, Bab ini berisi teori-teori yang relevan sebagai dasar penelitian, seperti: Teori Efektivitas Kinerja Lembaga, dan Teori Manajemen Bencana.

Bab III yaitu metode penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data sumber data, Teknik pengumpulan data serta Teknik analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai bagaimana efektivitas kinerja PUPR kota banjarmasin dalam mengatasi banjir.

Bab V Penutup, bab kelima, terdiri dari kesimpulan dari data penelitian serta saran-saran dan masukan.

Daftar Pustaka.